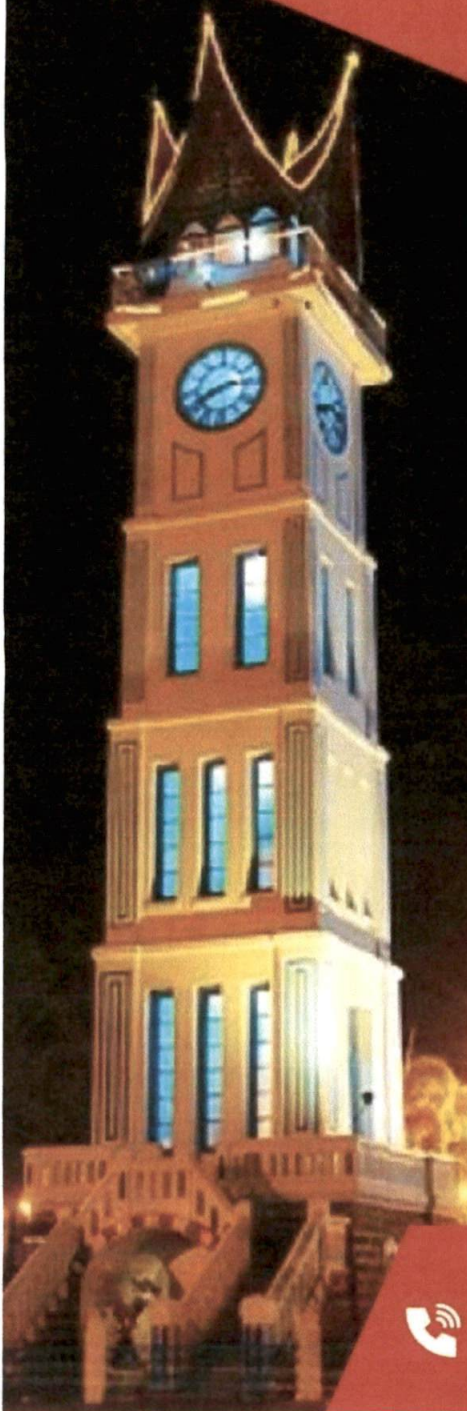




2025

RENJA PERUBAHAN BKPSDM



0752-33050



Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45 - 196 - 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan dan kesinambungan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Bukittinggi serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
 - b. bahwa dengan telah diverifikasinya rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan susunan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu memiliki tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan:

- a. rancangan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
 - b. rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025; dan
 - c. rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
- KETIGA : Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. bab I mengenai Pendahuluan;
 - b. bab II mengenai Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan II Tahun 2025;
 - c. bab III mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - d. bab IV mengenai Penutup.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 13 Oktober 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,


MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS



HANTARAN KATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat, Karunia dan Nikmat-NYA, sehingga penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025 adalah dalam rangka menyikapi perubahan keadaan yang tidak sesuai dengan realisasi pelaksanaan, adanya regulasi dan kebijakan-kebijakan baru sesuai arahan pimpinan dan tentunya dari hasil evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Disamping itu pertimbangan lain dari perubahan ini antara lain, perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, pergeseran anggaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan 2025 sesuai dengan aturan yang berlaku harus dimasukkan kembali dalam perubahan APBD, penghapusan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena terjadinya perubahan kinerja dan kebijakan atau pola pelaksanaan kegiatan serta perubahan atas dasar pertimbangan lain yang dirasa perlu dan mendesak.

Kiranya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta tugas dan fungsi dan upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bukittinggi, 13 Oktober 2025

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ^{3/2}
KOTA BUKITTINGGI



INDRA HARTATI, SKM, M.Si
NIP. 197503282000032003

DAFTAR ISI

HANTARAN KATA	i-1
DAFTAR ISI	i-2
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-1
1.3. Maksud dan Tujuan	I-2
1.4. Sistematika Penulisan	I-3
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	II-1
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-1
BAB IV PENUTUP	IV-1



I.1. Latar Belakang

Sesuai arahan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam rangka kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pascapelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, guna mensinergikan penyelenggaraan pembangunan daerah dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, serta dan telah ditetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 maka masing-masing Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan terhadap rencana kerja yang sudah berjalan sampai dengan Triwulan II tahun 2025, identifikasi atas kendala dan hambatan yang terjadi serta masukan dan saran dari masing-masing bidang dan Sekretariat. Dimana Perubahan Rencana Kerja tersebut memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami pergeseran, penambahan atau pengurangan target kinerja serta pagu anggaran dan kelompok sasaran, baik yang dilaksanakan langsung oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi maupun yang dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain.

I.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; dan
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025.

I.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025 adalah untuk memaksimalkan pelaksanaan rencana kerja dan rencana kerja anggaran hingga akhir tahun anggaran 2025 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025 ini, adalah :

1. Sebagai bentuk antisipasi dalam menyikapi perubahan regulasi dan perkembangan keadaan yang tidak sesuai lagi dengan perencanaan yang telah disusun pada tahun sebelumnya.
2. Sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kota Bukittinggi dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan hingga akhir Tahun 2025.

3. Sebagai Bahan Evaluasi dan Pengendalian Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025.

I.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025, didasarkan pada sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, memaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, memaparkan evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan rencana kerja dan pendanaan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Bukittinggi setelah anggaran perubahan.

BAB IV : PENUTUP, menguraikan penutup yaitu hal-hal yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang tujuan dilakukannya evaluasi antara lain untuk mengidentifikasi kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakannya.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara berkala yaitu Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sebesar Rp. 7.436.177.555,-, dan mengalami refocusing anggaran pada pergeseran kedua menjadi sebesar Rp. 7.362.201.555,- yang digunakan untuk mendukung 3 Program, 11 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan.

Realisasi Anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II pelaksanaan anggaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel. 2.1.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan terhadap APBD
sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan s/d Juni 2025	Persen tase (%)	Sisa Anggaran	Persen tase (%)
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITTINGGI	7.362.201.555	2.841.175.716	38,59	4.521.025.839	61,41
5.03	Urusan Kepegawaian	6.633.899.755	2.804.454.466	42,27	3.829.445.289	57,73
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	4.843.499.555	2.199.030.621	45,40	2.644.468.934	54,60
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.580.400	3.755.500	43,77	4.824.900	56,23
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.580.400	3.755.500	43,77	4.824.900	56,23
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.568.476.555	2.073.055.697	45,38	2.495.420.858	54,62

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan s/d Juni 2025	Persen tase (%)	Sisa Anggaran	Persen tase (%)
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji danTunjangan PNS	4.563.508.755	2.072.294.797	45,41	2.491.213.958	54,59
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	4.967.800	760.900	15,32	4.206.900	84,68
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.048.000	0	0,00	7.048.000	100,00
5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	7.048.000	0	0,00	7.048.000	100,00
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.450.500	60.713.169	75,47	19.737.331	24,53
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.115.000	990.000	88,79	125.000	11,21
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.656.200	6.736.710	87,99	919.490	12,01
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.179.300	875.000	27,52	2.304.300	72,48
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.250.000	2.659.000	62,56	1.591.000	37,44
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.250.000	49.452.459	76,97	14.797.541	23,03
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.362.000	10.573.340	29,08	25.788.660	70,92
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.362.000	9.840.500	29,50	23.521.500	70,50
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.000.000	732.840	24,43	2.267.160	75,57
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	142.582.100	50.932.915	35,72	91.649.185	64,28
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	15.258.840	38,94	23.931.160	61,06
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	98.500.000	32.667.075	33,16	65.832.925	66,84
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000	1.102.000	38,80	1.738.000	61,20
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.052.100	1.905.000	92,83	147.100	7,17
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	1.790.400.200	605.423.845	33,82	1.184.976.355	66,18
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	442.120.600	285.075.406	64,48	157.045.194	35,52
5.03.01.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	9.843.500	0	00,00	9.843.500	100,00
5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	55.707.400	36.640.100	65,77	19.067.300	34,23
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12.428.400	2.290.000	18,43	10.138.400	81,57

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Keuangan s/d Juni 2025	Persen tase (%)	Sisa Anggaran	Persen tase (%)
5.03.01.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	180.419.800	180.000.000	99,77	419.800	0,23
5.03.01.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	183.721.500	66.145.306	36,00	117.576.194	64,00
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	569.632.000	158.813.294	27,88	410.818.706	72,12
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	37.590.400	21.362.000	56,83	16.228.400	43,17
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	73.410.000	37.258.150	50,75	36.151.850	49,25
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	458.631.600	100.193.144	21,85	358.438.456	78,15
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	670.791.600	131.386.210	19,59	539.405.390	80,41
5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	415.586.800	12.654.710	3,05	402.932.090	96,95
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	214.673.200	118.731.500	55,31	95.941.700	44,69
5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	40.531.600	0	0,00	40.531.600	100,00
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	107.856.000	30.148.935	27,95	77.707.065	72,05
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.215.200	239.800	3,86	5.975.400	96,14
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7.864.600	0	0,00	7.864.600	100,00
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	17.220.400	14.434.075	83,82	2.786.325	16,18
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	7.871.400	0	0,00	7.871.400	100,00
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	38.725.200	8.840.500	22,83	29.884.700	77,17
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	7.689.100	3.470.000	45,13	4.219.100	54,87
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	22.270.100	3.164.560	14,21	19.105.540	85,79
5.04	Urusan Pendidikan dan Pelatihan	728.301.800	36.721.250	5,04	691.580.550	94,96
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	728.301.800	36.721.250	5,04	691.580.550	94,96
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	728.301.800	36.721.250	5,04	691.580.550	94,96
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	728.301.800	36.721.250	5,04	691.580.550	94,96

Sumber: Laporan Triwulan II Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Serapan anggaran Triwulan II Tahun 2025 sebesar 38,59%, walaupun dibandingkan dengan rencana anggaran kas masih rendah, hal ini disebabkan karena perubahan regulasi dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sehingga tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana serta beberapa belanja yang telah dilakukan namun belum dilakukan pencatatan dan penatausahaan keuangannya.

Adapun capaian kinerja dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.2.
Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan terhadap APBD
sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Renja Tahun 2025	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Ket.
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	5 Dokumen	50,00%	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	35 Orang/ Bulan	50,00%	
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	50,00%	
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
5.03.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	0,00%	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 Paket	100,00%	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	100,00%	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	50,00%	
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	75,00%	
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	85,00%	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	50,00%	
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	50,00%	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah				

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Renja Tahun 2025	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Ket.
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	1 Unit	50,00%	
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	50,00%	
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	50,00%	
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	100,00%	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah				
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				
5.03.01.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	75,00%	
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	75,00%	
5.03.01.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2 Dokumen	50,00%	
5.03.01.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	100,00%	
5.03.01.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50,00%	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN				
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelasana dan Mutasi ASN antar Daerah	3 Dokumen	65,00%	
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	65,00%	
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	50,00%	
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN				
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	95 Orang	15,00%	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	80 Orang	75,00%	
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	35 Orang	00,00%	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	20,00%	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Renja Tahun 2025	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Ket.
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen	15,00%	
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	90,00%	
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa	150 Orang	24,00%	
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	50,00%	
5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	50,00%	
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	2 Dokumen	25,00%	
5.04	Urusan Pendidikan dan Pelatihan				
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	30,00%	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025

Dari tabel tersebut di atas, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sudah cukup baik, meskipun belum seluruh sub kegiatan dapat merealisasikan target sesuai dengan yang ditetapkan mengingat terdapat perubahan regulasi terkait teknis pelaksanaan sub kegiatan maupun pelaporan penatausahaan keuangan.

Kegiatan atau sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja dibawah 50%, sebagai berikut :

- 1) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas, belum terealisasi mengingat sifat sub kegiatan ini adalah insidentil;
- 2) Peningkatan Kapasitas ASN, kegiatan ini masih menunggu jadwal kegiatan diklat untuk Sertifikasi Kompetensi Aparatur Keuangan Daerah dari PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi;
- 3) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional, kegiatan ini mengalami rasionalisasi pada anggaran perubahan tahun 2025;
- 4) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, merupakan kegiatan pendukung koordinasi dan konsultasi pelaksanaan perwako TPP;

- 5) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan penilaian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada akhir tahun berjalan;
- 6) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai, saat ini dalam tahap verifikasi pengajuan usulan penerima Tanda Jasa berupa Satya Lencana Karya Satya;
- 7) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai, tidak banyaknya kasus perceraian yang diproses oleh BKPSDM hingga Tri Wulan II ini;
- 8) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, kegiatan ini belum terealisasi karena sesuai arahan pimpinan Diklat PIM IV/PKP, Diklat PIM III/PKA dan Diklat PIM II/PKN tidak diselenggarakan untuk tahun ini, sehingga dananya akan di refocusing pada perubahan anggaran.

Sedangkan untuk evaluasi hasil terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kota Bukittinggi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada Formulir E.81 pada Aplikasi E-Monev Pemerintah Kota Bukittinggi, berikut ini :

FORMULIR E.81
Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Bukittinggi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Periode Pelaksanaan : Triwulan II 2025

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										I		II							III		IV	
				-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%								
-1	-2	-3	-4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-16				
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			12.331.863.588		6.326.850.504		7.087.659.847		1.181.019.497		1.660.156.219		0		2.841.175.716	40,09	9.167.826.220	74,34		
5		PENUNJANG URUSAN			6.083.580.470		4.078.279.624		4.387.116.847		1.049.410.332		1.149.620.289		0		2.199.030.621	50,12	6.277.310.245	103,18		
5.03		PENUNJANG URUSAN			6.083.580.470		4.078.279.624		4.387.116.847		1.049.410.332		1.149.620.289		0		2.199.030.621	50,12	6.277.310.245	103,18		
5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP SKPD	Nilai	6.083.580.470		4.078.279.624	BB	4.387.116.847		1.049.410.332		1.149.620.289		0	0	2.199.030.621	50,12	0	6.277.310.245	103,18	
5.03.01.201		Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	%	0	32.500.000	0	39.622.333	100	26.660.400	0	0	3.755.500	0	0	0	3.755.500	14,09	0	43.377.833	133,47	
1	5.03.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	32.500.000		39.622.333	Dokumen	26.660.400	2	0	1	3.755.500	0	0	0	3.755.500	14,09	2	43.377.833	133,47	BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					133,47	
Predikat Kinerja																					SR	
5.03.01.202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	%	0	5.614.444.496	0	3.659.387.838	100	4.016.791.447	0	1.000.507.002	0	1.072.548.695	0	0	0	2.073.055.697	51,61	0	5.732.443.535	102,10
2	5.03.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	5.579.444.496		3.659.387.838	Orang/ bulan	4.002.816.947	33	1.000.507.002	33	1.071.787.795	0	0	0	2.072.294.797	51,77	33	5.731.682.635	102,73	BKPSDM
3	5.03.01.202.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	12	35.000.000		-	Laporan	13.974.500	3	0	0	760.900	0	0	0	760.900	5,44	3	760.900	2,17	BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					104,90	
Predikat Kinerja																					SR	
5.03.01.205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	0	41.000.000	0	-	100	14.048.000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	
4	5.03.01.205.02	Pengadaan Pakelan Dinas beserta AtributKelengkapannya	-	-	26.000.000		0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	BKPSDM
5	5.03.01.205.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalamMelaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1	15.000.000		0	Laporan	14.048.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00	BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					0,00	
Predikat Kinerja																					SR	
5.03.01.206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	0	229.400.000	0	191.202.733	100	137.472.700	0	14.572.000	0	46.141.169	0	0	0	60.713.169	44,16	0	251.915.902	109,82
6	5.03.01.206.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	3.000.000		990.000	Paket	1.115.000	0	0	0	990.000	0	0	0	990.000	88,79	0	1.980.000	66,00	BKPSDM
7	5.03.01.206.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	11.000.000		6.788.850	Paket	7.656.200	0	0	0	6.736.710	0	0	0	6.736.710	87,99	0	13.525.560	122,96	BKPSDM
8	5.03.01.206.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	7.500.000		4.032.600	Paket	3.163.700	0	0	0	875.000	0	0	0	875.000	27,66	0	4.907.600	65,43	BKPSDM
9	5.03.01.206.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	4.400.000		3.748.350	Laporan	4.787.800	0	0	0	2.659.000	0	0	0	2.659.000	55,54	0	6.407.350	145,62	BKPSDM
10	5.03.01.206.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	203.500.000		175.642.933	Laporan	120.750.000	0	14.572.000	0	34.880.459	0	0	0	49.452.459	40,95	0	225.095.392	110,61	BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					102,13	
Predikat Kinerja																					SR	
5.03.01.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	0	11.350.000	0	51.157.909	100	36.362.000	0	10.142.635	0	430.705	0	0	0	10.573.340	29,08	0	61.731.249	543,89
11	5.03.01.208.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2.350.000		49.227.650	Laporan	33.362.000	0	9.727.000	0	113.500	0	0	0	9.840.500	29,50	0	59.068.150	2513,54	BKPSDM
12	5.03.01.208.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	6.000.000		1.930.259	Laporan	3.000.000	0	415.635	0	317.205	0	0	0	732.840	24,43	0	2.863.099	44,38	BKPSDM
13	5.03.01.208.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	3.000.000		-	Laporan	0	0	-	0	-	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0,00	BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					852,64	
Predikat Kinerja																					SR	
5.03.01.209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	%	0	154.885.974	0	136.908.811	87	155.782.100	0	24.188.695	0	26.744.220	0	0	0	50.932.915	32,69	0	187.841.726	121,28
14	5.03.01.209.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayar Pajaknya	1	42.930.859		35.838.461	Unit	39.190.000	1	9.023.520	0	6.235.320	0	0	0	15.258.840	38,94	1	51.097.301	119,02	BKPSDM
15	5.03.01.209.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	103.655.115		94.003.850	Unit	111.700.000	13	12.560.175	0	20.106.900	0	0	0	32.667.075	29,25	13	126.670.925	122,20	BKPSDM

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									I		II		III		IV													
-1	-2	-3	-4		-5		-6		-7		-8		-9		-10		-11		(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		-16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
16	5.03.01.209.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20		5.000.000		5.124.500	Unit	2.840.000	0	700.000	0	402.000	0	0	0	0	0	1.102.000		38,80	0	6.226.500		124,53	BKPSDM	
17	5.03.01.209.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3		3.300.000		1.942.000	Unit	2.052.100	3	1.905.000	0	-	0	0	0	3	1.905.000		92,83	3	3.847.000		116,58	BKPSDM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												120,58
Predikat Kinerja																												SR
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						3.734.308.923		2.060.424.527		2.293.049.000		122.882.165		482.541.680		0	0		605.423.845		26,40		2.865.848.372		71,39			
5.03 KEPEGAWAIAN						3.734.308.923		2.060.424.527		2.293.049.000		122.882.165		482.541.680		0	0		605.423.845		26,40		2.865.848.372		71,39			
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAAN DAERAH						3.734.308.923		2.060.424.527	66	2.293.049.000		122.882.165		482.541.680		0	0		605.423.845		26,40	0	2.865.848.372		71,39			
5.03.02.201 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					%	0	1.060.418.819	0	493.848.676	88	626.520.500	0	50.636.756	0	234.438.650	0	0	0	0	285.075.406		45,50	0	778.724.082		73,44		
1	5.03.02.201.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2		53.598.859		14.930.750	Dokumen	19.680.100	0	0	0	-	0	0	0	0	0		-	0	14.930.750		27,86	BKPSDM		
2	5.03.02.201.03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	2		313.703.513		122.219.230	Dokumen	222.638.100	0	25.185.950	0	11.454.150	0	0	0	0	36.640.100		16,46	0	158.859.330		50,64	BKPSDM		
3	5.03.02.201.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2		46.132.167		23.008.642	Dokumen	19.032.600	0	0	0	2.290.000	0	0	0	0	2.290.000		12,03	0	25.298.642		54,84	BKPSDM		
4	5.03.02.201.08	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1		273.492.160		151.142.241	Lembaga	180.419.800	0	0	0	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000		99,77	0	331.142.241		121,08	BKPSDM		
5	5.03.02.201.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1		373.492.120		182.347.813	Dokumen	184.749.900	0	25.450.806	0	40.694.500	0	0	0	0	66.145.306		35,80	0	248.493.119		66,53	BKPSDM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												64,19
Predikat Kinerja																												SR
5.03.02.202 Mutasi dan Promosi ASN					Tingkat Akurasi Data Kepegawaian	%	0	633.929.047	0	253.954.573	88	288.204.900	0	37.730.274	0	121.083.020	0	0	0	158.813.294		55,10	0	412.767.967		65,11		
6	5.03.02.202.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah, Jumlah Rekomendasi Mutas antar Instansi yang diterbitkan	1		152.424.584		42.907.731	Dokumen	44.943.200	0	0	0	21.362.000	0	0	0	0	21.362.000		47,53	0	64.269.731		42,16	BKPSDM		
7	5.03.02.202.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1		99.899.477		75.379.675	Dokumen	65.585.900	0	17.426.750	0	19.831.400	0	0	0	0	37.258.150		56,81	0	112.637.825		112,75	BKPSDM		
8	5.03.02.202.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1		381.604.986		135.667.167	Dokumen	177.675.800	0	20.303.524	0	79.889.620	0	0	0	0	100.193.144		56,39	0	235.660.311		61,81	BKPSDM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												72,24
Predikat Kinerja																												SR
5.03.02.203 Pengembangan Kompetensi ASN					Persentase ASN yang Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan; Persentase ASN yang telah Mengikuti Pengembangan	%	0	1.839.543.831	0	1.183.814.116	89	1.179.167.000	0	5.556.250	0	125.829.960	0	0	0	131.386.210		11,14	0	1.315.200.326		71,50		
9	5.03.02.203.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitarnya	100		1.481.302.444		962.086.700	Orang	832.776.800	0	5.383.000	0	7.271.710	0	0	0	0	12.654.710		1,52	0	974.741.410		65,80	BKPSDM		
10	5.03.02.203.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	90		324.957.493		219.516.216	Orang	230.826.800	0	173.250	0	118.558.250	0	0	0	0	118.731.500		51,44	0	338.247.716		104,09	BKPSDM		
11	5.03.02.203.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	35		33.283.894		2.211.200	Orang	115.563.400	0	0	0	-	0	0	0	0	0		-	0	2.211.200		6,64	BKPSDM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												58,85
Predikat Kinerja																												SR
5.03.02.204 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					Nilai e-Lapkin; Persentase Penurunan ASN yang Mendapatkan Hukuman Disiplin	%	0	200.417.226	0	129.007.162	92	199.156.800	0	28.958.885	0	1.190.050	0	0	0	30.148.935		15,14	0	159.156.097		79,41		
12	5.03.02.204.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1		0		5.246.150	Dokumen	30.544.800	0	0	0	239.800	0	0	0	0	239.800		0,79	0	5.485.950		0,00	BKPSDM		
13	5.03.02.204.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1		0		11.480.788	Dokumen	33.614.100	0	0	0	-	0	0	0	0	0		-	0	11.480.788		0,00	BKPSDM		
14	5.03.02.204.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1		48.626.371		24.345.660	Laporan	37.976.200	0	14.434.075	0	-	0	0	0	0	14.434.075		38,01	0	38.779.735		79,75	BKPSDM		
16	5.03.02.204.05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150		25.822.975		17.698.594	Orang	18.070.300	0	0	0	-	0	0	0	0	0		-	0	17.698.594		68,54	BKPSDM		
17	5.03.02.204.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Rekomendasi Bimbingan Konseling Pra Nikah dan Proses Bimbingan dan Konseling Kasus Perceraian dan Menerbitkan SK Izin Cerai atau Isiah (Rujuk Kembali) yang Diterbitkan	20		47.602.155		45.771.660	Orang	46.959.200	0	8.727.000	0	113.500	0	0	0	0	8.840.500		18,83	0	54.612.160		114,73	BKPSDM		
18	5.03.02.204.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1		78.365.725		10.340.260	Laporan	7.670.300	0	3.470.000	0	-	0	0	0	0	3.470.000		45,24	0	13.810.260		17,62	BKPSDM		
19	5.03.02.204.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai yang dilayani	1		0		14.124.050	Dokumen	24.321.900	0	2.327.810	0	836.750	0	0	0	0	3.164.560		13,01	0	17.288.610		0,00	BKPSDM		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																												70,16
Predikat Kinerja																												-

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2025 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								I	II	III	IV											
-1	-2	-3	-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	-16						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			2.513.974.193	187.946.353	407.494.200	8.727.000	27.994.250	0	0	36.721.250	9,01	224.667.603	8,94							
5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.513.974.193	187.946.353	407.494.200	8.727.000	27.994.250	0	0	36.721.250	9,01	224.667.603	8,94							
5.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas Aparatur	%	2.513.974.193	187.946.353	66	407.494.200	8.727.000	27.994.250	0	0	36.721.250	9,01	224.667.603	8,94						
5.04.02.202		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang telah Mengikuti Pembinaan Kompetensi	%	0	2.513.974.193	0	187.946.353	89	407.494.200	0	8.727.000	0	27.994.250	0	0	36.721.250	9,01	0	224.667.603	8,94	
1	5.04.02.202.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	2.513.974.193	187.946.353	Laporan	407.494.200	0	8.727.000	0	27.994.250	0	0	0	0	36.721.250	9,01	0	224.667.603	8,94	BKPSDM
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					8,94	
Predikat Kinerja																					SR	



BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan realisasi pencapaian anggaran dan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Triwulan I dan II tahun 2025,

Berdasarkan laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja hingga Triwulan II (kondisi Juni 2025) baik terhadap realisasi pencapaian target kegiatan maupun penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan diketahui perlunya dilakukan perubahan terhadap program dan kegiatan yang meliputi perubahan pagu, target kinerja dan penambahan kegiatan atau sub kegiatan.

Perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,
2. Pergeseran anggaran yang telah dilakukan pada tahun berjalan 2024 sesuai dengan aturan yang berlaku harus dimasukkan kembali dalam perubahan APBD,
3. Penghapusan kegiatan yang tidak mungkin dilakukan karena terjadinya perubahan kinerja dan kebijakan atau pola pelaksanaan kegiatan,
4. Perubahan atas dasar pertimbangan lain yang dirasa perlu dan mendesak.

Rencana perubahan program dan kegiatan yang disesuaikan tersebut dituangkan dalam bentuk perubahan anggaran kegiatan/sub kegiatan sebagaimana Tabel 3.1, berikut ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KNERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							7.087.899.847,00	7.436.177.555,00	8.696.555.361,00	1.598.895.514,00							9.664.944.496,00		
	5	UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							7.087.899.847,00	7.436.177.555,00	8.696.555.361,00	1.598.895.514,00							9.664.944.496,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							6.680.165.847,00	6.847.875.795,00	7.998.253.561,00	1.278.087.914,00							8.664.944.496,00		
1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Nilai SAKIP SKPD	-	BB BB			BB BB	4.387.116.647,00	4.893.999.555,00	4.843.499.561,00	1.777.827.849,00							6.164.944.496,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Program dan Kegiatan	-	100 Persen				26.690.400,00	19.580.400,00	8.580.400,00	-18.080.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN BKPEDM Kota Bukittinggi		32.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	26.690.400,00	19.580.400,00	8.580.400,00	-18.080.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			32.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-	100 Persen				4.016.791.447,00	4.575.478.555,00	4.566.476.561,00	551.685.114,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN BKPEDM Kota Bukittinggi		5.611.944.496,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bu lan	36 Orang/b ulan	4.002.816.947,00	4.563.508.755,00	4.563.508.761,00	560.691.814,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			5.579.444.496,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.974.500,00	11.967.800,00	4.967.800,00	-9.006.700,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			32.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 Persen				14.048.000,00	14.048.000,00	7.048.000,00	-7.000.000,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Kota Bukittinggi		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	1 Laporan	14.048.000,00	14.048.000,00	7.048.000,00	-7.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 Persen				137.472.700,00	105.960.500,00	80.450.500,00	-57.022.200,00				Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN BKPEDM Kota Bukittinggi		281.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUHA	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	7.656.200,00	7.656.200,00	7.656.200,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	3.163.700,00	3.179.300,00	3.179.300,00	15.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6.03.01.2.06.0008		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	4.787.800,00	4.250.000,00	4.250.000,00	-537.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			8.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BKPD				1 Laporan	1 Laporan	120.760.000,00	69.750.000,00	64.250.000,00	-56.500.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			260.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah			-	90 Persen		0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN BKPSDM Kota Bukittinggi		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Intermediasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	100 Persen		36.362.000,00	36.362.000,00	36.362.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN BKPSDM Kota Bukittinggi		71.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1 Laporan	33.362.000,00	33.362.000,00	33.362.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			36.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berakadit baik			-	90 Persen		155.782.100,00	142.562.100,00	142.562.100,00	-13.200.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN BKPSDM Kota Bukittinggi		152.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	39.190.000,00	39.190.000,00	39.190.000,00	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			45.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perlakuan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperiksa dan dibayarkan Pajak dan Perlakuan				13 Unit	13 Unit	111.700.000,00	98.500.000,00	98.500.000,00	-13.200.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0003		Pemeliharaan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJUA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK BASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUJAH	RKPD 2025	APSD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	2.840.000,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	Kota Bukitlmgpl, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	2.062.100,00	2.062.100,00	2.062.100,00	0,00	Kota Bukitlmgpl, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas Aparatur				70 Pnsen	70 Pnsen	2.353.049.000,00	1.753.878.200,00	3.114.754.000,00	206.951.000,00							2.500.000.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberitahuan dan Informasi Kepegawaian ASN	Pelayanan Layanan Kepegawaian yang telah memenuhi Standar Nasional				-	90 Pnsen	626.820.800,00	449.120.600,00	543.896.500,00	-62.624.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Kota Bukitlmgpl		510.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	1 Dokumen	19.660.100,00	18.843.500,00	29.843.500,00	10.183.400,00	Kota Bukitlmgpl, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK																				
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	1 Dokumen	222.636.100,00	60.707.400,00	94.457.400,00	-126.163.700,00	Kota Bukitlmgpl, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			260.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberitahuan																				
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberitahuan				2 Dokumen	1 Dokumen	19.032.800,00	18.426.400,00	26.426.400,00	7.396.600,00	Kota Bukitlmgpl, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0008 Fasilitas Lembaga Profesi ASN																				
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Ditebalkan				1 Lembaga	1 Lembaga	180.419.800,00	160.419.800,00	180.419.800,00	0,00	Kota Bukitlmgpl, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	164.749.800,00	170.721.600,00	212.747.400,00	27.997.500,00	Kota Bukitlmgpl, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			190.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Pelayanan Layanan Kepegawaian yang telah memenuhi Standar Nasional				-	90 Pnsen	268.204.800,00	433.606.000,00	864.627.800,00	576.422.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Kota Bukitlmgpl		310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pnsen Tingkat jabatan Administrasi, jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	44.943.200,00	44.590.400,00	63.860.400,00	18.947.200,00	Kota Bukitlmgpl, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																				
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	65.565.900,00	83.410.000,00	73.410.000,00	7.824.100,00	Kota Bukitlmgpl, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025				NASIONAL	DAERAH			19	20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	177.675.800,00	305.607.800,00	727.327.400,00	549.651.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			180.000.000,00	BADAN KEPEKAWAJAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi				-	80 Persen	1.179.167.000,00	722.791.600,00	1.598.373.700,00	419.206.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Kota Bukittinggi		1.425.000.000,00	BADAN KEPEKAWAJAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0001		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	832.778.800,00	440.568.600,00	1.343.168.900,00	510.392.100,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.000.000.000,00	BADAN KEPEKAWAJAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0004		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				80 Orang	70 Orang	230.826.800,00	221.673.200,00	214.673.200,00	-16.153.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			300.000.000,00	BADAN KEPEKAWAJAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0014		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				35 Orang	5 Orang	119.563.400,00	60.531.600,00	40.531.600,00	-75.031.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			125.000.000,00	BADAN KEPEKAWAJAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penuntasan ASN yang mendapat Hukuman Disiplin				-	80 Persen	189.156.800,00	148.366.000,00	107.856.000,00	-61.300.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Kota Bukittinggi		255.000.000,00	BADAN KEPEKAWAJAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0001		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	30.644.600,00	20.215.200,00	8.219.200,00	-24.329.400,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			40.000.000,00	BADAN KEPEKAWAJAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0002		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	33.614.100,00	17.684.600,00	7.864.600,00	-25.749.500,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			40.000.000,00	BADAN KEPEKAWAJAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0003		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	1 Laporan	37.876.200,00	17.220.400,00	17.220.400,00	-20.755.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			45.000.000,00	BADAN KEPEKAWAJAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0005		Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				150 Orang	150 Orang	18.070.300,00	18.871.400,00	7.871.400,00	-10.198.900,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			25.000.000,00	BADAN KEPEKAWAJAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0007		Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				20 Orang	20 Orang	48.959.200,00	39.225.200,00	38.725.200,00	-8.234.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			55.000.000,00	BADAN KEPEKAWAJAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0008		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	1 Laporan	7.670.300,00	13.689.100,00	7.689.100,00	18.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pengawasan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			15.000.000,00	BADAN KEPEKAWAJAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0009		Pelaksanaan Proses dan Perencanaan Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB- KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENY OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	BESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH			18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perorangan Pegawai yang Dibayai				1 Dokumen	1 Dokumen	24.321.900,00	23.270.100,00	22.270.100,00	-2.051.800,00	Kota Bukittinggi, Semua Kacamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							407.494.200,00	788.301.800,00	728.301.800,00	320.807.600,00							1.000.000.000,00		
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas Aparatur				-	70 Person	407.494.200,00	788.301.800,00	728.301.800,00	592.505.800,00							1.000.000.000,00		
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kembangan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang telah mengikuti Pengembangan Kompetensi				-	80 Person	407.494.200,00	788.301.800,00	728.301.800,00	320.807.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan	ASN Kota Bukittinggi		1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1 Laporan	407.494.200,00	788.301.800,00	728.301.800,00	320.807.600,00	Kota Bukittinggi, Semua Kacamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Pengembangan tata kelola pemerintahan 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan			1.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			J U M L A H						7.087.659.847,00	7.436.177.555,00	8.638.555.361,00	3.892.655.601,00							9.864.944.495,00		

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pada tahun anggaran 2025 sesuai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi mengelola dana sebesar Rp. 7.436.177.555,-, dan mengalami refocusing anggaran pada pergeseran kedua sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Rp. 7.362.201.555,- untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Dimana dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan hingga Triwulan II Tahun 2025 telah dapat terealisasi sebesar Rp. 2.841.175.716,- atau 38,59% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.521.025.839,- atau 61,41%.

Dengan memperhatikan capaian keuangan tersebut serta dinamika perkembangan keadaan yang terjadi maka dirasa perlu penyesuaian atau perubahan terhadap target dan realisasi keuangan. Hal ini dapat dilihat pada tabel Penetapan Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi Tahun 2025.

Perubahan pagu anggaran untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025 pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, dari pagu APBD Awal 2025 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp. 6.800.192,-, sehingga pagu RKPD perubahan menjadi Rp. 7.429.377.363,-.

Pengurangan anggaran kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun anggaran 2025 sebagaimana tersebut, terjadi karena akumulasi penambahan dan pengurangan anggaran pada masing-masing sub kegiatan. Adapun program/kegiatan yang perlu ditampung dan ditambahkan anggarannya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, yaitu adanya Belanja Modal untuk pengadaan Laptop, Printer dan Voice Recorder sebesar Rp. 126.117.000,-;
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, yaitu penambahan anggaran belanja cetak Map Dinas BKPSDM untuk penyerahan SK Kenaikan Pangkat, SK Pensiun dan SK PNS 100% sebesar Rp. 2.756.500,-;

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, yaitu penambahan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 13.000.000,-;
- 2. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, yaitu penambahan belanja gaji tenaga outsourcing satu orang sopir sebesar Rp. 16.252.500,-;
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, yaitu penambahan belanja service pemeliharaan AC, Laptop dan Printer sebesar Rp. 4.870.000,-;
- 3. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 Untuk beberapa sub kegiatan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terjadi penambahan belanja perjalanan dinas dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN, sebesar Rp. 6.000.000,-;
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, sebesar Rp. 20.450.000,-;
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, sebesar Rp. 3.000.000,-
- 4. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN, yaitu penambahan anggaran belanja alat tulis kantor dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 17.542.500,-;
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN, yaitu penambahan anggaran untuk belanja alat tulis kamtor, honor narasumber tim panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, belanja sewa hotel, belanja kursus singkat dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp. 331.931.500,-;
- 5. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan Diklat Orientasi PPPK sebesar Rp. 351.153.000,-;
- 6. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Pegawai, terjadinya penambahan belanja perjalanan dinas untuk penjemputan SLKS sebesar Rp. 4.000.000,-;

Sedangkan untuk beberapa sub kegiatan tidak mengalami perubahan anggaran dan sub kegiatan lainnya yang mengalami pengurangan anggaran sesuai

dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.



BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perubahan baik target kinerja maupun pagu anggaran untuk mencapai kinerja yang optimal dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Perubahan yang dilakukan berupa penambahan atau pengurangan kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, yang selanjutnya akan menjadi acuan bagi ASN di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Akhir kata, kiranya Perubahan Rencana Kerja ini dapat memenuhi target kinerja secara maksimal sebagai wujud pertanggungjawaban Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka mewujudkan good governance.


WALI KOTA BUKITTINGGI
[Signature]
MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS